



Jurnal Samudra

Mengembangkan Pemikiran Kritis dan Solidaritas Sosial,
Membangun Masyarakat Adil dan Demokratis



Medan Pertarungan Identitas

No.1 Tahun 2003

JURNAL SAMUDRA
No. 1 Tahun 2003

Medan Pertarungan Identitas

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Pengantar Redaksi	3
2. Mendorong Tumbuhnya Komunitas Kritis <i>Budhis Utami</i>	4
3. Identitas , Perempuan, dan Globalisasi: Beberapa Catatan <i>Manneke Budiman</i>	6
4. Stigma: Kekerasan Representasi dan Representasi Kekerasan <i>St. Sunardi</i>	15
5. Politik Identitas yang berbasiskan Etnis dan Proses Memperjuangkannya <i>Thung Ju Lan</i>	18
6. Tentang Penulis	22
7. Sekilas KAPAL Perempuan	23

Pengantar Redaksi

Mengeluarkan sebuah jurnal bukan pilihan mudah bagi KAPAL Perempuan. Format jurnal, sebagaimana dikatakan oleh Daniel Dhakidae dalam bukunya *Cendekiawan dan Kekuasaan, Dalam Negara Orde Baru*(2003) tak terhindarkan mengandalkan dan menysasar pada sektor terdidik, yaitu klas terpelajar yang mampu melakukan kontemplasi dan memberikan pemikiran-pemikiran alternatif. Dan ini tentu saja menjadi beban tersendiri bagi KAPAL Perempuan yang berorientasi pada aktivisme dan populisme, dan sejauh mungkin menghindari elitisme dan eksklusifisme. Akan tetapi pada saat bersamaan, khususnya dalam konteks Indonesia krisis saat ini dimana pemikiran-pemikiran alternatif mandeg karena para cendekiawan lebih sibuk menjawab pertanyaan pers dibandingkan menjawab pertanyaan rakyat kecil, dibutuhkan ruang-ruang ekspresi bagi berkembangnya wacana kritis yang pada tingkat tertentu mensyarakatkan kedalaman perenungan. Di tengah tarik menarik inilah KAPAL Perempuan memberanikan diri untuk membuat sebuah jurnal yang diberi nama *Jurnal Samudra*. Sebuah jurnal yang jauh dari tendensi untuk menjadi elitisme, tetapi mencoba menjadi bagian dari pemberhentian sejenak atau refleksi dari aksi berkesinambungan yang tak kunjung henti dilakukan oleh rakyat kecil, perempuan, aktivis, dan kaum terpelajar.

Mencoba menjadi populis berarti harus berkonteks pada situasi dan kondisi masyarakat yang nyata. Oleh karena itu, KAPAL Perempuan dengan segala keterbatasannya dalam membaca dan meraba situasi, mempunyai kesimpulan sementara bahwa isu pluralisme dan pendidikan alternatif merupakan isu-isu krusial dalam konteks kekinian Indonesia yang diwarnai oleh kemiskinan, terkotak-kotaknya masyarakat berdasarkan suku dan agama, tingginya korupsi yang sudah pada tingkat memuakkan, kekerasan, dan menguatnya politik identitas. Kedua isu ini berkaitan satu sama lainnya. Pluralisme dalam arti luas, yaitu keberagaman dalam banyak hal, tidak akan terwujud dan terkuatkan tanpa adanya proses-proses pembelajaran yang memanusiakan manusia, memerdekakan, membangun keberagaman pilihan sekaligus menghargai pilihan orang lain, yang kesemuanya ini diproses dan dihasilkan oleh pendidikan-pendidikan alternatif. Isu pluralisme dan pendidikan alternatif inilah yang menjadi tema pokok dari *Jurnal Samudra*. Tema-tema khusus dari keduanya digali KAPAL Perempuan dari serangkaian diskusi bulannya tentang pluralisme yang telah dilakukan sejak tahun 2000 sebagai bagian dari usaha KAPAL untuk membangun komunitas kritis yang concern pada isu pluralisme dan pendidikan alternatif.

Dalam edisi perdana *Jurnal Samudra* ini, identitas dan keterkaitannya dengan globalisasi, politik identitas, dan stigmatisasi diangkat sebagai tema utama yang ditulis secara cukup mendalam oleh Maneke Budiman, St. Sunardi, dan Thung Ju Lan. Ketiga tulisan ini diharapkan dapat merangsang pemikiran-pemikiran kritis lainnya dan sedikit banyak dapat dipakai untuk memahami mengapa kekerasan dengan segala wajahnya mudah terjadi di bumi ini. Terlalu berlebihan jika dikatakan jurnal ini akan turut menyumbang terbangunnya budaya wacana kritis di Indonesia, tetapi minimal jurnal membuka ruang bagi siapa saja untuk membagi analisis kritisnya dalam memandang dunia. Tentu saja, tidak diharapkan *Jurnal Samudra* ini hanya datang sekali untuk kemudian hilang. Elan memmbanguni kerja keras, dan solidaritas menjadi prasyarat yang tak dapat ditampik. Tetapi antusiasme dari publik terhadap jurnal ini akan menjadi pendorong utamanya.

Mendorong Tumbuhnya Komunitas Kritis

Runtuhnya rejim Suharto yang memerintah selama 32 tahun dianggap awal perubahan sistem pemerintahan dari otoriter menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Tetapi sayangnya, proses transisi ini tidak berjalan mulus karena adanya situasi ekonomi krisis yang diperberat dengan besarnya hutang luar negeri. Selain itu, masyarakat sedang dihadapkan pada konflik-konflik berbasis agama, etnis, dan keinginan untuk lepas dari pemerintah RI yang telah menimbulkan kerugian besar baik harta benda maupun nyawa. Belum lagi trauma-trauma karena kekerasan, penyiksaan, dan perkosaan yang diaami khususnya oleh perempuan dan anak-anak. Indonesia tampak sedang menuju kehancuran karena perang saudara. Pertanyaan mendasarnya, mengapa hal ini muncul dan menjadi marak menjelang dan sesudah turunya Suharto padahal selama pemerintahan Orde Baru situasi terkesan aman, damai, harmonis, dan tenang?

Sangat disadari sistem otoriter yang diterapkan Orde Baru tidak memberikan ruang pada keberadaan keberagaman identitas sehingga ruang ekspresi menjadi terbatas. Padahal masyarakat Indonesia sangat plural baik dari agama, etnis, bahasa, ras dan ideologi yang dianut. Negara mempunyai kekuasaan sangat besar dalam mengkonstruksikan identitas-identitas agama, etnis, sosial, budaya, maupun perempuan yang dapat mendukung kekuasaannya. Tidak ada ruang bagi kelompok-kelompok dengan identitas tertentu untuk mengekspresikan diri mereka. Negara akan segera membungkamnya dengan stigma yang diikuti pelarangan, pembatasan, sampai pada penangkapan, seperti yang terjadi pada sekte-sekte keagamaan dan etnis tertentu. Tindakan-tindakan represif inilah yang menyebabkan banyak kalangan takut untuk mengekspresikan dirinya, yang pada gilirannya telah menyumbang pada terciptanya situasi yang seakan tenang, harmonis, aman, dan damai, meskipun sebenarnya di dasarnya penuh gejolak yang setiap saat meledak. Hal ini benar terjadi kemudian setelah terjadi perubahan sistem negara yang lebih terbuka setelah rejim Soeharto jatuh.

Tetapi kita tidak boleh hanya terpaku pada analisis itu. Proses globalisasi pada tingkat tertentu telah menyumbang terjadinya situasi di atas. Dunia yang semakin tanpa batas dan pemberlakuan sistem ekonomi yang kapitalistik membuat identitas-identitas kesukuan dan agama, selama ini terpresi, semakin kuat. Situasi yang penuh ketidakpastian, persaingan yang ketat, dan penguniversalan segala sesuatu telah mendorong orang untuk kembali pada kelompok dengan kesamaan identitas karena memberikan rasa aman, harapan, dan bahkan kepastian. Kompleksitas persoalan inilah yang mendorong orang untuk melakukan perlawanan terhadap sesuatu yang berbeda di luar dirinya karena selalu dicurigai sebagai ancaman yang akan menghancurkan dirinya. Barangkali tujuan perlawanan ini bagi sebagian kalangan di tingkat elit disadari sepenuhnya, namun bagi masyarakat kalangan bawah mungkin sama sekali tidak dipahami kecuali terdorong oleh propaganda ataupun penyebar luasan sentimen kelompok yang berbeda.

Situasi masyarakat yang cepat bertindak tanpa menggali dan mencari penyebab persoalan yang dihadapinya ini terjadi karena sudah dikonstruksikan oleh sistem-sistem yang melingkupinya. Model indoktrinasi mendapatkan tempat dalam situasi semacam ini. Sikap tidak kritis terhadap persoalan yang ada ditambah dengan proses interaksi yang tersekat yang memberikan batasan pada sesuatu yang berbeda di luar dirinya, yang menyebabkan konflik-konflik mudah terjadi. Keprihatinan terhadap situasi tersebut mendorong KAPAL Perempuan berupaya membangun komunitas kritis yang dapat mengembangkan dialog-dialog terbuka mengenai persoalan-

persoalan yang berbasiskan pengalaman pribadi dan komunitas yang kemudian dikaitkan dengan persoalan-persoalan masyarakat aktual untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran alternatif. Ruang untuk menumbuhkan pemikiran kritis ini diciptakan melalui serangkaian diskusi tematik bulanan yang mengangkat tema-tema mengenai pluralisme.

Tema pluralisme diangkat karena merupakan persoalan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Pluralisme dikaji secara mendalam, termasuk mengkritisi segala hal yang menimbulkan persoalan termasuk wilayah yang selama ini dianggap paling sakral yaitu agama. Seperti yang telah terjadi, kepercayaan terhadap agama yang tidak kritis mendorong orang atau kelompok melakukan apa saja termasuk kekerasan pada sesamanya. Oleh karena itulah pada periode awal diskusi bulanan ini, yaitu pada tahun 2000, tema yang diambil adalah "Spirit Lintas Agama".

Pada tahun selanjutnya, yaitu periode 2001-2002, diskusi masalah pluralisme ini semakin berkembang. Ada kebutuhan untuk secara serius mengkaji konsep pluralisme itu sendiri dan mengartikannya dalam arti luas dengan menyentuh isu etnisitas misalnya. Oleh karena itu, tema yang diangkat pada periode ini adalah "Spirit Pluralisme". Sedangkan tema diskusi untuk tahun 2003 adalah "Pluralisme, Politik Identitas dan Hak-Hak Asasi Perempuan", yang merupakan perkembangan tema sekaligus merespon kecenderungan politik saat ini yang diwarnai oleh pertarungan politik identitas yang pada tingkat tertentu telah mempengaruhi hak-hak asasi perempuan. Beberapa pemikiran yang muncul dari diskusi periode inilah yang coba dihadirkan dalam Jurnal Samudra edisi pertama ini.

Penerbitan Jurnal Samudra ini merupakan upaya untuk menginformasikan lebih luas hasil diskusi yang telah dilakukan sekaligus mengetahui seberapa jauh pemikiran yang muncul tersebut berkontribusi pada masyarakat khususnya yang berhadapan langsung dengan situasi nyata persoalan pluralisme. Jurnal ini juga bagian untuk membangun komunitas kritis yang lebih luas sehingga cita-cita membangun budaya wacana kritis sedikit demi sedikit mulai dibangun.

(Budhis, Koordinator Pengembangan Wacana Pluralisme, penanggungjawab diskusi pluralisme dan publikasi)

Beberapa Catatan

Manneke Budiman

Memahami Globalisasi

Dalam sebuah tulisannya, yang muncul di majalah *Newsweek* tak lama setelah gedung kembar di New York runtuh, Francis Fukuyama merenung-renung tentang teknologi yang, konon, telah menjadikan dunia sebagai sebuah *global village* yang semakin menyatu. Negara-bangsa, sebagai konsekuensinya, menjadi sebuah bangunan tradisional yang telah kehilangan relevansinya. Peristiwa 11 September membuat penulis *The End of History* ini bertanya-tanya: Apakah teknologi yang selama ini digunakan untuk mempromosikan kebebasan, seperti pesawat terbang, pencakar langit dan laboratorium biologi, kini telah digunakan untuk melawan penciptanya sendiri dengan cara-cara yang tidak dapat dibendung?¹

Semua ini memaksa Fukuyama melakukan refleksi atas tesis yang menggegerkan tentang akhir dari sejarah, yang ia lontarkan lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Pada saat itu, ia dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa evolusi masyarakat manusia lewat berbagai bentuk pemerintahan telah mencapai puncaknya pada demokrasi liberal yang modern serta kapitalisme yang berorientasi pasar. Lalu, apa jadinya ketika sekelompok kecil fanatik yang dianggap anti kemajuan punya kuasa untuk menimbulkan kehancuran yang luar biasa bagi peradaban? Di mata Fukuyama, ini adalah tantangan bagi demokrasi liberal modern –landasan utama globalisasi –yang harus disikapi dengan serius.²

Menurutnya, Amerika cenderung memandang segala industri dan nilai yang diciptakannya, seperti demokrasi, hak-hak individu, supremasi hukum dan kesejahteraan yang didasari oleh kebebasan ekonomi, sebagai aspirasi semesta yang serta merta akan diterima oleh semua orang di seluruh dunia. Namun, jangan-jangan, selama ini Amerika mengalami “rabun kultural” yang membuat mereka mengira bahwa nilai-nilai Barat berpotensi menjadi nilai-nilai semesta dunia? Ironisnya, bukan nilai-nilai gagah itu semua yang membuat seluruh dunia merasa dirinya “Amerika” melainkan solidaritas umat manusia pasca-tragedi September yang melahirkan kebersamaan global. Di hari terkalam dalam sejarah kontemporer umat manusia itu, semua orang menjadi “New Yorker” dan menyatakan solidaritasnya dengan Amerika yang menjadi korban.

Meskipun Fukuyama tidak sekalipun menggunakan istilah “globalisasi” dalam tulisannya, konsep tersebut muncul dalam berbagai versi, seperti *global village* (mengutip Marshall McLuhan di tahun 1960-an), demokrasi liberal modern, kapitalisme berorientasi pasar, kebebasan ekonomi, dan lain-lain. Serangan tak terduga pada pagi yang kelabu tanggal 11 September jelas, bagi Fukuyama, telah mengguncangkan tidak hanya sendi-sendi globalisasi melainkan juga mekasa banyak orang untuk mempertanyakan kembali masa depan dan kesemestaan globalisasi.

¹ Pertanyaan ini dilontarkan dalam kaitan dengan pemanfaatan teknologi, seperti teknologi aviasi dan informasi, oleh para penyerang World Trade Center, gedung pencakar langit yang menjadi simbol kejayaan penguasa teknologi dunia, yaitu Amerika Serikat. Periksa *Newsweek*, edisi Desember 2001-Februari 2002, “Their Target: The Modern World”, hal 54-59.

² Fukuyama masih bersikukuh bahwa hipotesisnya yang telah berusia lebih dari sepuluh tahun itu masih berlaku dan meskipun peristiwa 11 September merupakan suatu langkah mundur, itu hanyalah ulah orang-orang yang putus asa karena tidak mampu mengehtikan laju kemajuan dunia modern.

Kita semua, kata Kevin Robins(1997), kini sedang hidup dalam masa perubahan yang luar biasa. Ada sebuah dunia baru yang tampaknya sedang terbentuk di depan mata kita, yang ditandai oleh melemahnya berbagai struktur dan orientasi yang telah lama kita kenal serta hadirnya cakrawala-cakrawala kemungkinan baru yang menyebabkan terjadinya disorientasi. Perkembangan dramatis inilah yang ia sebut dengan fenomena globalisasi.³ Semakin banyak orang di dunia bahkan tak lagi dapat membayangkan hidup tanpa sms dan email untuk berkomunikasi atau internet untuk memperoleh informasi. Padahal, belum terlalu lama berselang ketika semuanya itu masih relatif asing bagi kita. Perubahan kehidupan yang begitu cepat ini membuat kita tidak pernah punya kesempatan untuk berhenti sejenak dan menarik nafas untuk menyadari apalagi membangun identitas kita. Tida waktu lagi untuk memikirkan siapa kita atau hendak menjadi apa kita pada saat ini.

Globalisasi meliputi juga peningkatan mobilitas barang dan komoditas, informasi dan komunikasi, prooduk dan jasa, serta manusia, yang melintas batas-batas yang ada. Bayangkan, kemanapun kita pergi pada saat ini, kita selalu dibayang-bayangi oleh Coca-cola, MTV, CNN, dan Yahoo. Mobilitas memang meningkat dengan pesat, tetapi globalisasi juga memungkinkan kita melihat dunia tanpa pergi ke mana-mana karena dunia kini mengahdirkan dirinya kepada kita dalam bentuk limpahan informasi yang meruah. Identitas kita dibentuk oleh air bah bermacam-macam “benda asing” dari luar yang memporak-porandakan kesadaran kita dan membuatnya mustahil bahkan untuk dipersepsikan secara utuh.

Namun, Robbins juga mengingatkan bahwa globalisasi bukanlah semata-mata penggantian segala sesuatu yang muncul terlebih dahulu dengan segala sesuatu yang muncul belakangan. Ini kerap menjadi mitos tentang globalisasi yang dapat menjebak, seperti yang diilustrasikan oleh Fukuyama di atas. Ada keadaan saling berhadap-hadapan dan saling lebur antara kekukuhan unsur-unsur lama dan inovasi-inovasi baru.⁴ Ia menolak gagasan-gagasan Kenichi Ohmae dalam ‘Global Consumers Want Sony not Soil’(1991) yang menyatakan bahwa yang dikehendaki orang saat ini bukanlah tanah air dan nasionalisme melainkan antena parabola dan Sony Walkman.

Di mata Ohmae, globalisasi semata-mata membuat kita dilahirkan bukan untuk menjadi bagian dari sesuatu melainkan, untuk membeli (‘not to belong but to buy’). Sebaliknya, Robins melihat bahwa tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam kultur konsumerisme global yang dibayangkan Ohmae. Konsisten dengan pandangannya tentang globalisasi, Robins berpendirian bahwa globalisasi merupakan sebuah proses yang tidak merata dan penuh dengan kontradiksi. Ada sekelompok orang yang keluar sebagai pemenang, tetapi ada juga yang kalah dan terpinggirkan, dan mereka inilah yang dapat menimbulkan gangguan dan destabilisasi bagi proses perubahan global (hal 44.)

Apakah dengan demikian dapat diasumsikan bahwa Robins telah memberikan jawaban bagi pertanyaan Fukuyama karena pemahamannya atas globalisasi yang lebih berfokus pada kontradiksi

³ Sama seperti Fukuyama, Robins memaknai globalisasi sebagai meleburnya, struktur-struktur dan garis-garis batas lama negara-negara bangsa, serta semakin menggejalanya transnasionalisasi kegiatan ekonomi dan kultural, yang kerap dibayangkan sebagai penciptaan suatu ruang atau komunitas global dengan kita semua sebagai warga dunia global. Ada pengalaman-pengalaman, harapan-harapan, dan kemungkinan-kemungkinan baru, tetapi ada juga ketidakpastian-ketidakpastian dan kekhawatiran yang baru pula

⁴ Bagi Robins, proses perubahan global terjadi secara berbeda-beda dan dialami secara berbeda-beda pula oleh semua orang(hal 20.). Merujuk pada Ulf Hannerz(1993), Robins sepakat bahwa bagi sebagian orang, misalnya, bangsa masih sangat relevan dan bahkan mungkin menguat seiring dengan globalisasi tetapi kini dialami dan dipahami secara berbeda. Ada yang ingin mendefinisikannya dengan orientasi pada masa depan dan tidak lagi pada masa lalu. Ada yang berada dalam sebuah bangsa tetapi tidak menjadi bagian dari bangsa itu. Ada lagi yang mungkin lebih merasa sebagai warga bangsa yang transnasional, dll.

daripada kemajuan linear belaka masih bisa diperdebatkan lebih lanjut. Namun, yang jelas, bagaimanapun cara setiap orang bereaksi pada globalisasi, kesemuanya melibatkan secara intens apa yang secara sekilas telah disinggung di atas, yakni identitas.

Identitas dan Perempuan dalam globalisasi

Ernesto Laclau(dikutip dalam du Gay, 1997) pernah mengemukakan bahwa identitas selalu 'tergantung pada apa yang berada di luar dirinya, yang menyangkali sekaligus memberinya kemungkinan untuk mengada (hal. 289). Contohnya, buruh industri modern bukanlah seorang individu yang universal dan bebas gender melainkan seorang laki-laki pencari nafkah yang memiliki seorang istri yang tergantung kepadanya dan yang pekerjaannya adalah mengurus kebutuhannya sehari-hari, anak-anaknya dan rumah tangganya. Dengan demikian, identitas buruh industri modern itu sebagian besar dibangun di atas kekuasaan dan status yang diberikan kepada laki-laki dan suami, serta konstruksi perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga, yang secara ekonomi hidup dalam ketergantungan pada suami dan diberi peran domestik di rumah. Artinya, identitas politik yang stabil seorang buruh industri modern didirikan di atas *positioning* perempuan sebagai "yang liyan" atau "yang lain" pada wilayah domestik.

Meskipun demikian, dikotomi ini mengalami perubahan relasi bersamaan dengan perubahan posisi ekonomi dan sosial perempuan, perubahan teknologi, dan struktural dalam ekonomi global, meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan, dan tingginya angka pengangguran laki-laki. Hal ini paling tidak, menunjukkan kebenaran kata-kata Stuart Hall, yaitu bahwa identitas kita selalu diposisikan tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial, politik, kultural, dan historis,⁵ sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada tataran-tataran sosial dan teknologi, misalnya, turut menentukan terjadinya perubahan pada tataran ekonomi.

Namun, bahkan sebelum perubahan-perubahan ini terjadi, peranan perifer yang dimainkan perempuan di atas sesungguhnya telah memperlihatkan *ketaksaannya* atau kekuatannya. Perempuan memainkan peranan yang oleh Michele Mattelart(1986) disebut dengan '*invisible work*', yaitu peranan '*support economy*' yang meungkinkan seluruh aktifitas lainnya terjadi. Seorang perempuan di rumah memainkan peranan ekonomi yang fundamental dalam memulihkan kesiapan suaminya yang buruh itu untuk kembali bekerja pada hari berikutnya. Tanpa itu keseluruhan aktifitas ekonomi dapat terpengaruh. Namun, indikator-indikator pertumbuhan sosio-ekonomi yang digunakan negara ditetapkan dengan cara sedemikian rupa, demikian pula dengan ukuran-ukuran pertumbuhannya, sehingga menyembunyikan pentingnya nilai ekonomi pekerjaan rumah tangga yang dilakukan perempuan pada saat itu. (hal 65)

Ketaktampakan kerja perempuan dan pengecilan nilai produktif pekerjaan rumah tangga mereka dijadikan titik keberangkatan yang menentukan dalam pembentukan citra perempuan oleh media. Segala hal yang dilakukan perempuan dilegitimasi bukan sebagai kerja melainkan kewajiban alami yang terkait dengan kodrat mereka.⁶ Namun, Stuart Hall juga menegaskan bahwa setiap orang tetap

⁵ Hall mengemukakan bahwa, karena intervensi kondisi-kondisi eksternal tersebut, kita tidak lagi bisa berbicara tentang 'siapa diri kita atau 'menjadi apa kita pada saat ini' dengan penuh kepastian. Namun, seperti segala sesuatu yang historis sifatnya, identitas kita juga secara terus menerus mengalami perubahan(1990; cf1993)

⁶ Lewat program-program radio dan televisi yang ditayangkan pada jam-jam tertentu sesuai dengan jadwal "kewajiban" perempuan di rumah, menurut Mattelart, media telah berpartisipasi dalam

punya kuasa untuk memposisikan dirinya sendiri dalam identitas yang dikondisikan oleh faktor-faktor eksternal itu. Bagi saya, ini adalah suatu pertanyaan penting, terutama apabila kita masih berkehendak untuk memaknai pembentukan identitas sebagai sebuah proses subyektif.

Dorothy Dobson, dalam tulisannya "Housewives and the Mass Media"(1980), memperlihatkan dengan jernih bagaimana perempuan-perempuan "domestik" tetap mampu secara aktif memilih acara-acara teve yang diprogram sebagai "dunia perempuan" sekaligus menolak acara-acara yang disajikan sebagai "dunia laki-laki". Acara-acara seperti siaran berita, politik, dan perang, film laga dan dokumenter, termasuk "dunia laki-laki" yang ditolak, dianggap menjemukan dan membuat *stress*, tetapi juga diakui bernilai penting.⁷ Acara yang berbau politik dianggap membosankan dan menimbulkan stress, sementara siaran tentang perang atau pemogokan buruh dipandang terlalu berorientasi pada laki-laki dan menyebabkan mimpi buruk atau sulit tidur.⁸

Hal yang barangkali bisa mengusik kesadaran sebagian dari kita adalah bahwa kebanyakan acara yang dipilih oleh perempuan adalah yang menurut mereka bersifat 'sehari-hari' namun yang sesungguhnya jauh dari situasi nyata kehidupan para perempuan itu. Di antara acara-acara semacam itu, opera sabun termasuk acara yang paling digemari. Alasannya adalah dengan menonton opera sabun, perempuan berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup sehari-hari, yang menyediakan sarana atau kemungkinan bagi perempuan untuk melakukan identifikasi diri dengan tokoh-tokoh perempuan dalam film. Ini adalah *positioning* perempuan atau identitasnya sendiri. Namun, kenyataan ini juga dapat dimaknai sebaliknya. Lewat acara-acara seperti ini jugalah feminitas secara ideologis direproduksi dan dikukuhkan bagi perempuan.⁹

Dalam sebuah pertemuan para ahli Indonesia di Amerika pada pertengahan tahun 1999, setelah krisis ekonomi melanda Indonesia, ada sebuah peristiwa menarik yang terjadi. Seorang Indonesianis perempuan asal Indonesia, Saraswati Sunindyo, membacakan sebuah puisi karangannya sendiri dalam forum tercabut, yang berisi gugatan atas sikap dan cara para Indonesianis Amerika(laki-laki) dalam memandang dan memperlakukan dirinya. Sarawati, dalam menyikapi krisis ekonomi di Indonesia, menggunakan pendekatan yang kurang lebih sama seperti para perempuan dalam penelitian Dobson memaknai opera sabun yang disajikan stasiun-stasiun teve. Baginya:

*The so-called Asian Economic Crisis
The Economy crisis that also hit Indonesia
Is very real
To me
-
Very disheartening*

memberikan 'kompensasi' bagi keharusan perempuan untuk tinggal di rumah dan, dengan demikian, membuat perempuan semakin terpisahkan dari wilayah produksi dan identitas ke – feminin-annya semakin dikukuhkan(hal 66.)

⁷ Mereka lebih suka meninggalkan ruangan daripada menonton acara-acara tersebut. Dalam hal siaran berita, dari semua yang disampaikan, mereka menentukan bagian-bagian yang tidak ingin ditonton. Pilihan ini ditentukan tidak hanya oleh nilai penting berita tetapi juga oleh dampaknya pada seseorang(hal 111).

⁸ *Ibid*, hal.112.

⁹ Dobson menyadari kegandaan makna ini. Perempuan hanya dapat memilih apa yang menjadi "minat perempuan" dari sebatas yang disediakan oleh media dan menolak apa yang mereka kategorikan sebagai "minat laki-laki". Baik acara yang mereka gemari maupun yang mereka tolak mengukuhkan pemisahan berbasis gender atas wilayah-wilayah minat, dan hal ini ditentukan oleh lokasi (rumah) serta struktur feminitas yang sekunder dibandingkan dengan dunia laki-laki yang kental diwarnai oleh produksi (kerja) dan politik yang, meskipun tidak disukai, tetap dipandang penting oleh para perempuan responden penelitian(hal.113-114).

And,

-

That I cannot turn my heart away from it

Krisis di Indonesia bukan sekedar berita, atau bahan penelitian ilmiah, sebagaimana para Indonesianis asing cenderung melihatnya. Sebagai seorang perempuan Indonesia yang sedang menantikan tenure untuk diterima menjadi pengajar di sebuah universitas di Amerika, Saraswati berbicara tentang dampak krisis bagi dirinya:

And yes,

The situations

In the land far away from North America

Affect me

Deeply

-

The economic and political situations in Indonesia

-

For me

-

Means

Both monetary and emotional

*Bail out*¹⁰

Yang secara intens terasa barangkali bukan persoalan tegangan antara positioning Indonesia sebagai obyek kajian atau subyek afektif, yang tampaknya menjadi tema utama puisi tersebut. Bagi saya, yang justru menarik adalah kesadaran Saraswati bahwa dirinya terperangkap di dalam struktur dunia akademik Barat bahkan sebelum ia betul-betul sepenuhnya menjadi bagian dari struktur tersebut. Saraswati tidak sedang menyerukan perlawanan terhadap keseluruhan sistem yang hendak atau telah memosisikan dirinya sedemikian rupa melainkan berusaha membuka ruang-ruang artikulasi bagi subyektifitasnya. Dalam situasi seperti ini, ia sama dengan perempuan-perempuan Dorothy Dobson yang mustahil menolak keseluruhan citraan yang diberikan media kepada mereka, dan yang sadar akan kemustahilan ini, namun yang tetap mencari kemungkinan-kemungkinan artikulasi diri.

Dalam kehidupan pribadi saya yang nyata, masih kerap saya jumpai orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki credit card, atau bahkan ATM, untuk berbelanja dan menarik uang dari bank. Bagi mereka, ini pertama-tama bukanlah persoalan resistensi terhadap kemajuan, melainkan pilihan sadar yang diambil terkait erat dengan kesinambungan identitas. Walaupun ada sesuatu yang dicoba untuk dilawan, hal itu adalah godaan untuk membiarkan identitas terus-menerus diposisikan oleh kondisi-kondisi eksternal tanpa adanya upaya yang seimbang dari diri sendiri untuk turut berperan memosisikan identitas diri. Godaan tersebut terwujud, misalnya dalam bentuk kesediaan untuk menerima kendali konsumsi melalui sarana-sarana pembelanjaan uang yang virtual. Namun, yang pasti, mereka bukanlah orang-orang yang anti kemajuan karena dalam aspek kehidupan mereka yang lain, semisal dalam aspek komunikasi, mereka aktif menggunakan produk-produk teknologi mutakhir seperti internet atau telepon seluler.

¹⁰ Judul puisi karya Saraswati tersebut adalah "Born in Indonesia", yang menyuarakan bahwa ia tidak akan pernah sepenuhnya diterima sebagai 'kolega' oleh para Indonesianis lainnya di Amerika karena, seperti yang ia katakan di akhir puisinya, 'precisely because Indonesia is not just the object of my study'.

Merka jelas juga tidak identik dengan orang-orang putus asa dalam pandangan Fukuyama, yang tidak melihat alternatif lain kecuali menghancurkan simbol-simbol kemajuan peradaban untuk menghentikan laju globalisasi. Sebagaimanapun dahsyatnya keursakan yang ditimbulkan oleh aksi-aksi mereka, mereka tetap dapat dilihat sebagai pihak yang kalah karena membiarkan dirinya sepenuhnya dibentuk oleh faktor-faktor politis dan historis yang ada. Itulah sebabnya dengan mudah lebih dari separuh dunia memberi mereka label teroris, yang juga merupakan wujud intervensi kuasa-kuasa eksternal dalam pembentukan identitas. Namun demikian, barangkali ini juga bukan satu-satunya cara untuk melihat persoalan tersebut.

Hal yang juga tidak selalu disadari oleh pemikir-pemikir neo-orientalis seperti Fukuyama (dan juga Huntington), atau pemimpin-pemimpin Barat kontemporer seperti George W. Bush dan Tony Blair, adalah bahwa globalisasi selalu membawa paradoks di dalam dirinya sendiri. Salah satunya, menurut Walter Mignolo (1999), adalah bahwa globalisasi telah memberi peluang kepada kelompok-kelompok subaltern dalam negara-bangsa untuk membangun aliansi-aliansi transnasional yang melampaui batas-batas negara dalam upaya memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai hak mereka (hal 44).¹¹

Globalisasi, dengan kata lain, secara tidak langsung telah membantu kelompok-kelompok yang oleh Barat dilukiskan sebagai "anti kemajuan" itu untuk membangun sebuah identitas lintas negara-bangsa lewat pemanfaatan teknologi dan informasi. Mereka tidak pernah bertatap muka atau saling bertegur sapa secara langsung, namun *internet* menyediakan wadah yang ajaib untuk saling berkomunikasi secara virtual dan mencari serta bertukar pengetahuan tentang bagaimana caranya membuat bahan peledak, mengambil alih pesawat terbang, membangun organisasi sel dan sebagainya. Sedangkan teknologi telepon seluler dimanfaatkan untuk menjadi pemicu ledakan bom dari jarak jauh.

Maka, ketika kemudian negara-negara Barat beramai-ramai menutup perbatasannya, dan dalam waktu hanya semalam multikulturalisme yang digembor-gemborkan di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia itupun lenyap bagai ditelan bumi, para "teroris globalisasi" itu sesungguhnya telah memenangkan sebuah pertempuran. Ini membuktikan tesis Hall bahwa siapapun dapat mempunyai kuasa untuk mengintervensi *positioning* identitas yang dilakukan bahkan oleh sebuah adikuasa. Amerika yang bebas, terbuka dan dikenal sebagai ujung tombak demokrasi dalam waktu sangat singkat telah menjadi sebuah negara yang fasis, tertutup, dan represif: sebuah 'backlash' (meminjam Fukuyama) yang jauh lebih serius dampaknya pada gerak maju menuju terwujudnya *global village* dari pada runtuhnya gedung WTC.

Identitas, sebagaimana terlihat dalam berbagai paparan di atas, dalam era global ini bukan lagi merupakan sesuatu yang dapat digambarkan sebagai sebuah entitas melainkan sebuah proses yang terjadi di antara tarik-menarik antara kebutuhan akan kepastian dan keharusan untuk selalu berubah. Identitas bukanlah sebuah ruang yang dapat sepenuhnya direbut oleh subyek bukan karena dalam dunia global kini identitas telah hilang tetapi justru karena identitas kini sedang direkonstruksi dan diidentifikasi kembali.¹² Hanya saja, kalau selama ini upaya-upaya untuk membangun identitas

¹¹ Mignolo, tentu saja, tidak sedang membayangkan jaringan Islam fundamentalis global seperti Al Qaidah atau Jamaah Islamiyah, yang dengan sangat canggih memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir untuk membangun jaringan dan hubungan internasional di antara begitu banyak sel yang tersebar di seluruh dunia, bahkan juga di jantung-jantung peradaban Barat. Namun, kita dengan mudah dapat menempatkan kelompok-kelompok militan tersebut dalam kategori subaltern yang digunakan Mignolo.

¹² Periksa Zygmunt Bauman, "From Pilgrim to Tourist – or Short History of Identity" (1996), yang mengatakan bahwa 'ketika seseorang mencoba untuk sekehendak sendiri mengubah identitasnya secara radikal, ia akan kehilangan kendali' (hal .18). Menurut Bauman, apabila pada era modern persoalan yang dihadapi identitas

dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan ke depan, kini di era globalisasi proyeksinya justru kebalikannya, yakni bagaimana menghindarkan identitas dari fiksasi. Paling tidak, inilah yang menurut Zygmunt Bauman perlu dioertimbangkan (24: 1996) karena dunia kita pada saat ini adalah dunia yang sedang gemar berubah, dan perubahan itu terjadi dengan kecepatan yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Di dalam konteks perubahan yang kekal ini, masih dapatkah kita berbicara tentang politik identitas dan, apabila hal ini masih dianggap relevan., bagaimanakah cara membicarakannya? Khusus mengenai identitas perempuan, pertanyaan ini semakin mendesak urgensinya. Gerakan-gerakan perempuan secara umum bertitik-tolak dari positioning identitas yang berperspektif feminis, yang berhadap-hadapan dengan positioning patriarki atas perempuan. Walaupun keduanya berbeda secara fundamental dari segi ideologis, keduanya berpijak pada prinsip kepastian yang sifatnya esensial.

Tentang politik identitas perempuan

Dalam tahap perkembangan zaman ketika disorientasi identitas menjadi semakin nyata wujudnya dalam kehidupan sehari-hari akibat perubahan yang terus-menerus, ketika demokrasi dan pasar bebas menjadi kian identik dan sulit dibedakan, dan ketika yang ekonomi secara bertahap menjadi yang kultural serta sebaliknya,¹³ segala kepastian dan kejelasan yang tersangkut dengan identitas jelas terancam. Apabila demikian logikanya, maka politik identitas ini pun turut menjadi bermasalah karena suatu politik identitas baru dapat digagas dan dioperasionalkan ketika ada suatu titik pangkal yang relatif stabil dan pasti serta titik akhir yang sama stabilnya walaupun tidak begitu pasti.

Dengan demikian, politik identitas perempuan, misalnya yang ramai diagendakan oleh berbagai gerakan dan organisasi perempuan, baik di Dunia Pertama maupun di Dunia Ketiga, tampaknya langsung berhadap-hadapan dalam suatu hubungan yang kontradiktif dengan bagaimana identitas dipahami dalam globalisasi. Berbicara tentang politik identitas mau tidak mau harus dibayangkan adanya suatu identitas perempuan. Walaupun pemaknaan atas "perempuan" sendiri bisa beragam di kalangan organisasi-organisasi perempuan, yang menghasilkan agenda dan siasat yang beragam pula sebagai akibatnya, identitas perempuan yang berbeda dari konstruksi patriarki tetap dibayangkan ada dan pasti meskipun sedang terpinggirkan.

Bangun pemikiran seperti ini tidak compatible dengan situasi, identitas dalam budaya global yang justru ditandai oleh ketidakstabilan, kecairan, dan meminjam istilah Bauman 'daur ulang' identitas. Di lain pihak, mengikuti logika konstruksi identitas yang seperti ini bisa sama artinya dengan mengatakan bahwa politik identitas tidak lagi relevan untuk dirumuskan, apalagi diperjuangkan. Barangkali kita harus bersyukur bahwa ada kesadaran kritis, sebagaimana yang digagas oleh Kevin Robins, yaitu bahwa globalisasi tidak semata-mata sebuah proses perubahan melainkan juga sebuah proses yang meminggirkan (yang kalah) dan tidak setara bagi semua orang. Selama globalisasi masih

adalah bagaimana cara membangun identitas dan mempertahankannya agar solid dan stabil, pada era pasca modern persoalannya berubah menjadi bagaimana cara mencegah agar identitas tidak menjadi mandeg dan tetap terbuka

¹³ Frederic Jameson, dalam "Notes on Globalization as a Philosophical Issue" (1999) mengkritisi sistem transnasional yang menyebabkan semua ini terjadi, sehingga identitas pun mejadi sebuah persoalan yang pelik. Namun, ia juga menerima gagasan tentang identitas yang agak berbau posmo, yang selalu menyandingkan (dan membandingkan) identitas dengan apa yang dalam posmo terkenal dengan istilah 'difference', yaitu apa yang buan identitas tetapi harus ada agar identitas dapat mengada pula (hal 54-77).

kontradiktif seperti ini, barangkali politik identitas masih relevan untuk diserukan, dengan beberapa catatan tentu saja.

Yang unik dalam agenda-agenda perjuangan organisasi-organisasi perempuan adalah bahwa sasaran akhir mereka kurang lebih seragam, yakni menghilangkan *raison d'être* bagi keberadaan dan relevansi diri mereka sendiri. Artinya, jika dan apabila agenda perjuangan tersebut tercapai, yaitu perempuan memiliki kesempatan dan kedudukan yang setara dengan laki-laki (akhir dari peperangan melawan patriarki), maka politik identitas perempuan tak lagi dibutuhkan. Namun, selama globalisasi masih memproduksi berbagai ketidaksetaraan dan marginalisasi, selama itu pula politik identitas tetap relevan. Konteks keberadaan dan kepentingan politik identitas ini memang selalu sementara sifatnya, namun siapa yang dengan pasti dapat meramalkan kapan perjuangan mendobrak patriarki itu akan berakhir (dan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya)?

Ini adalah pertanyaan yang maha penting dan bisa jadi merupakan sebuah persoalan hidup atau mati. Politik identitas, dalam hal ini, tidak hanya penting tetapi juga absolut hukumnya meskipun sekali lagi sementara sifatnya. Gayatri Spivak menggagas suatu posisi yang tepat meski esensial, yang sengaja diambil untuk melawan esensialisme itu sendiri, yaitu 'strategic essentialism' (1990). Ada sikap esensial yang diambil agar politik identitas dapat dilangsungkan, akan tetapi ada juga kesadaran kritis atas sikap itu sendiri, dan berangkat dari kesadaran tersebut, kesementaraan dari esensialisme ini juga diterima sebagai suatu keniscayaan pada akhirnya. Apabila hal ini dilupakan, gerakan-gerakan perempuan dikhawatirkan juga akan berakhir pada posisi represif yang kini diduduki oleh patriarki.

Referensi

A. Primer

1. Bauman, Zygmunt (1996), "From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity", dalam ed. Stuart Hall dan Paul du Gay, *Questions of Cultural Identity*, London: Sage, hal.1-36
2. Debson, Dorothy (1980), "Housewives and the Mass Media", dalam ed. Stuart Hall *et al.*, *Culture, Media, Language*, London: Unwin & Hyman, hal 105-114
3. Du Gay, Paul (1997), "Organizing Identity: Making Up People at Work", dalam ed. Paul du Gay, *Production of Culture/Cultures of Production*, London: Sage Publications & The Open University, hal 286-322.
4. Fukuyama, Francis (2002), "Their Target: The Modern World", dalam *Newsweek, Issues 2002*, hal 54-59
5. Hall, Stuart (1990), "Cultural Identity and Diaspora", dalam ed. Jonathan Rutherford, *Identity, Community, Culture, Difference*, London: Lawrence & Wishart, hal. 222-237.
6. Hall, Stuart (1993), "New Ethnicities", dalam ed. James Donald dan Ali Rattansi, *Race, Culture, and Difference*, London: Sage, hal 252-259.

7. Jameson, Fredric(1999), " Notes on Globalization as a Philosophical Issue", dalam ed. Frederic Jameson dan Masao Miyoshi, *The Cultures of Globalization*, Durham & London: Duke University Press, hal 54-77.
8. Mattelart, Michele(1986), "Women and the culture Industries", dalam ed. Ichard Collins et al., *Media, Culture, and Society: A Critical Reader*, London: Sage, hal 63-81.
9. Mignolo, Walter D.(1999), "Globalization, Civilization Processes, and the Relocation of Languages and Culture", dalam ed. Fredric Jameson dan Masao Miyoshi, *The Cultures of Globalization*, Durham & London: Duke University Press, hal 32-53.
10. Robins, Kevin(1997), "What in the World's Going On?", dalam ed. Paul du Gay, *Production of Culture/Cultures of Production*, London: Sage Publications & The Open University, hal.12-47.
11. Spivak, Gayatri Chakravorty(1990), *The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues*, ed. Sarh Harasym, New York dan London: Routledge

B. Sekunder

1. Hannerz, Ulf(1993), "The Withering Away of the Nation?", dalam *Ethnos*, vol.58, no.3-4
2. Laclau, Ernesto(1990), *New Reflection on the Revolution of Our Time*, London: Verso
3. Ohmae, Keniichi(1991), "Global Consumers Want Sony not Soil", dalam *New Perspectives Quaterly*, Fall, hal. 72-73
4. Sunindyo, Saraswati (1999), "Born in Indonesia", *tidak dipublikasikan*.

Stigma: Kekerasan Representasi & Representasi Kekerasan

St. Sunardi¹⁴

Saya kenal kata “stigma” saat belajar sejarah gereja. Persisnya saat mempelajari hidup orang suci. Stigma muncul saat saya mempelajari Santo Fransiskus dari Asisi yang tulisan-tulisannya banyak dibacakan(didoakan) alam pertemuan-pertemuan kelompok perdamaian. Konon Fransiskus ini tiba-tiba mendapatkan tanda pada kedua belah tangannya dan bagian perutnya. Itulah artinya stigma. Sejak itu kata stigma menjadi salah satu puncak kesucian orang. Dalam gejala stigma, kita tahu bahwa tanda itu datangnya bukan dari manusia, melainkan dari kekuasaan yang lebih besar, di luar jangkauan kekuasaan manusia. Stigma terkait dengan perilaku dan kehidupan seseorang.

Kini stigma menjadi istilah yang ingin dihindari oleh setiap orang atau kelompok namun ingin diterapkan pada orang atau kelompok lain. Berbeda dengan stigma, stigmata (bentuk plural dari stigma) mengaami nasib sebaliknya: masih dipakai sebagai tanda yang membanggakan. Dalam kehidupan sehari-hari, stigma berkaitan dengan cap negatif yang tak bisa dihilangkan hampir seumur hidup. Stigma “penjudi” yang diterapkan pada teman-teman atau tetangga terus menempel tanpa jelas kapan akan berhasil dihilangkan. Seorang yang menerima stigma penjudi seolah tidak mempunyai kekuatan dari dirinya untuk menghilangkannya.

Mengapa kita membahas stigma? Wacana stigma bisa menjadi pintu masuk acana yang lebih luas, yaitu persoalan **identitas** (dan hal-hal yang terkait seperti subyektivitas, resistensi, representasi, dan sebagainya) yang kini menjadi kegelisahan berbagai kelompok sosial dan melahirkan begitu banyak teori(Hall menyebutnya telah menimbulkan “ a veritable discursive explosion”). Peristiwa bom di berbagai tempat dengan cara pemberitaannya memprihatinkan sejumlah tokoh Muslim karena tidak menguntungkan bagi citra keislaman di Indonesia. Ucapan Kwik Kian Gie “PDI adalah partai paling korup” menimbulkan amarah sejumlah fungsionaris, karena bisa merusak citra PDI menjelang pemilu. Citra kini menjadi begitu penting karena bisa mempengaruhi hidup dan mati suatu kelompok. Kalau citra kelompok rusak, hal itu bisa melukai para anggotanya atau menghalangi orang luar untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tersebut. Kini persoalan citra menjadi begitu sensitif karena teknologi informasi baru begitu menentukan dalam pembentukan citra seseorang atau kelompok. Barang siapa bisa merebut citra yang baik, dia merebut posisi dalam imaganisasi sosial suatu masyarakat. Sebaliknya, barang siapa tidak mempunyai akses dalam pembentukan citra dirinya dia akan tersingkir dalam masyarakat.

Dalam konteks inilah persoalan stigma akan dibicarakan konteks lainnya (seperti konteks politik) akan dibahas kemudian. Dilihat dari persoalan identifikasi, stigma atau stigmatisasi bisa dipandang sebagai salah satu sisi (stagnan) dari proses identifikasi yang dinamis. Kalau dalam proses identifikasi terjadi representasi diri stigmatisasi adalah proses pemblokiran representasi diri, karena kedirian seseorang atau suatu kelompok sudah “ditatoo” secara paten dari luar. Dalam situasi masyarakat tertentu, kedirian yang ditatoo dari luar ini secara perlahan-lahan, kemudian diappropriasi oleh seseorang atau kelompok karena itu satu-satunya tempat sosial yang diberikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, entah suka atau tidak suka, tatoo itu cenderung “diamini” demi kelangsungan hidup

¹⁴ Penulis adalah Ketua Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

sosialnya(bahkan ekonominya). Para PSK akan membawakan diri sebagai orang-orang yang sakit secara moral karena mereka dihadirkan demikian oleh masyarakatnya dan dihidupi dengan fasilitas-fasilitas yang diciptakan dengan paradigma orang-orang sakit secara moral. Para anggota bekas Partai Komunis Indonesia dipaksa membawakan diri dengan cara sebagai orang sakit secara ideologis, karena hanya dengan cara itu mereka bisa bertahan hidup. Suatu suku yang jauh dari “pusat” akan membawakan diri sebagai kelompok yang miskin secara kultural karena dibiarkan hidup dan dilindungi dengan fasilitas-fasilitas yang diciptakan dengan paradigma itu.

Identitas orang-orang ini bersifat stigmatis (*deadly*) dalam arti segala pintu tertutup bagi mereka untuk menegosiasikan kedirian mereka (dan kedirian diri yang lain). Mereka tidak mempunyai ruang untuk menilai diri mereka dan diri orang lain. Para PSK tidak mempunyai ruang untuk menilai moralitas para pembuat kebijakan yang menimpa diri mereka; para bekas partai terlarang tidak mempunyai ruang untuk menilai ideologi para pembuat kebijakan tentang ideologi-ideologi partai; dan orang-orang dari suku terasing tidak mempunyai ruang untuk menilai budaya orang-orang yang sudah “berbudaya”. Singkatnya, terjadi ketidakseimbangan komunikasi yang mengakibatkan kelompok-kelompok tersebut berada dalam ruang yang terkunci dan jalan sejarah yang diputus. Stigma, dengan demikian, tampil, sebagai wajah kematian dari proses identifikasi dan representasi kelompok, vonis mati bagi munculnya negosiasi. Apa yang dialami oleh Fransiskus Asisi sebenarnya juga tidak berbeda dengan situasi ini. Dia mendapatkan identitas, tato yang tak dapat diubah. Perbedaannya, dia menerima stigma dari Tuhan; sedangkan PSK, bekas PKI, suku “terasing” menerima identitas (tanpa identifikasi) dari pihak yang memperagakan diri – entah sadar atau tidak – seperti Tuhan.

Kalau tadi dikatakan bahwa stigma merupakan hasil dari kegagalan representasi atau sisi stagnan dari identifikasi, selanjutnya kita bisa mencari kekuatan yang menggagalkan representasi atau membuat identifikasi stagnan. Saya melihat bahwa di antara banyak kekuatan, kekuatan **propaganda** perlu disebut yang pertama. Propaganda saya utamakan di sini karena “vonis”apapun yang diberikan oleh penguasa tanpa pengakuan secara sosial, vonis tersebut tidak efektif(bahkan seseorang yang tervonis bisa menjadi hero bagi masyarakat atau bumerang bagi penguasa). Efektivitas ini sangat tergantung pada propaganda yang lebih suka mengajak orang untuk berpikir secara hitam- putih dan biner-sinkronis daripada dialektik-historis. Keberhasilan Amerika untuk menghitamkan Jamaah Islamiyah(JI), misalnya, tidak, hanya tergantung pada munculnya nama JI dalam PBB sebagai kelompok terlarang melainkan juga sangat tergantung propaganda di luar gedung PBB. Berbagai kasus stigmatisasi di Indonesia(terutama yang berkaitan dengan ideologi) sangat tergantung pada dukungan propaganda(dalam berbagai bentuknya). Memang dalam analisis selanjutnya kita masih harus meneliti situasi-situasi yang melahirkan propaganda yang bisa menjadi musuh komunikasi sosial yang kreatif.

Degan mengaitkan stigma dan propaganda, saya juga mau menggarisbawahi bahwa apa yang disebut stigma sesungguhnya bukannya tanpa **ambiguitas**. Stigma adalah ibarat identitas yang sedang tidur (seperti virus yang tidur atau dormant) yang bisa bangun dan berkembang pada situasi tertentu. Stigma ibarat ketidaksadaran (Freudian) yang bisa menjadi energi. Kalau masa propaganda bisa disebut sebagai masa represi, propaganda sesungguhnya sedang memendam ketidaksadaran yang suatu saat bisa muncul. Seperti disebut di atas, propaganda cenderung tidak mengajak orang berpikir secara dialektis-historis sehingga energi yang direpresi ini juga akan muncul secara biner-sinkronis. Berbagai ideologi terlarang tidak diberi tempat dengan segala perbedaannya sehingga begitu ada kesempatan untuk tampil ideologi-ideologi ini juga tidak sensitif pada perbedaan.

Kalau kita hendak mengaitkan persoalan stigma di atas, dengan **teori identitas** yang berkembang sekarang, kita mengaitkannya dengan teori yang diajukan oleh S. Hall yang intinya bisa dirumuskan sebagai berikut:

“Justru karena identitas dikonstruksi di dalam –an bukannya di luar- wacana, kita perlu memahami identitas sebagai dihasilkan dalam locus historis dan kelembagaan tertentu lewat pembentukan dan praktik wacana tertentu, dengan strategi-strategi pengucapan tertentu. Lebih daripada itu, identitas muncul dalam permainan kekuasaan tertentu, dengan demikian identitas lebih merupakan hasil dari penandaan (marking) perbedaan dan eksklusi daripada sebagai tanda atas kesatuan identik yang terbentuk secara alami – suatu identitas dalam artian tradisional (yaitu kesamaan yang meliputi keseluruhan yang bersifat mulus tanpa diferensiasi internal)”.

Pendapat Hall yang dirumuskan secara padat ini (ditambah terjemahan yang kurang enak) merupakan salah satu teori identitas yang banyak dipakai sekarang. Selanjutnya kita bisa menafsirkan maksud Hall sambil mengaitkan pendapat ini dengan apa yang sudah dibicarakan di atas.

Pertama. Identitas itu tidak bersifat abadi dan universal melainkan merupakan hasil dari praktik wacana yang terjadi pada periode sejarah tertentu dengan difasilitasi lembaga-lembaga tertentu. Jadi identitas itu terkait erat dengan penggunaan bahasa. Di samping itu Hall masih menambahkan bahwa pembentukan identitas tidak hanya tergantung pada pernyataan melainkan juga strategi untuk membuat pernyataan (enunciative strategies). Kalau di atas stigma saya kaitkan dengan propaganda, hal itu disebabkan karena propaganda (dengan berbagai bentuk pernyataan dan lembaga pendukungnya) merupakan bentuk praktik wacana yang sangat berpengaruh dalam konstruksi identitas. Stigma “pelacur”. “PKI” dan “penduduk terbelakang” dengan berbagai konotasinya (terutama konotasi hierarkis secara moral, ideologis, dan kultural) merupakan hasil konstruksi diskursif yang perlu ditilik ulang proses formasinya sampai kita bertemu dengan desire kelompok-kelompok tersebut. Kalau tidak, identitas-identitas semacam ini seolah-olah sudah berasal dari keabadian dan bergerak seperti itu selamanya. Melihat situasi ini, betapa pentingnya mencari cara untuk melampaui logika propaganda atau bermain-main untuk menunjukkan kontradiksi logika propaganda.

Kedua. Hall menyatakan bahwa identitas lahir karena praktik kekuasaan – suatu hubungan yang menghendaki perbedaan dan eksklusi. Perbedaan dan eksklusi merupakan bagian inheren dari identifikasi dan bukannya ditemukan pada akhir identifikasi. Perbedaan diperlukan untuk menciptakan pemaknaan dan eksklusi dimaksudkan untuk menciptakan garis batas antara identitas dengan dunia luar. Ibarat kalimat, suatu kelompok sosial menjadi meaningful karena prinsip-prinsip perbedaan (oleh karena itu Hall menggunakan istilah “marking” yang lazim dipakai dalam semiotika). Oleh karena itu identitas sudah selalu meliputi diferensiasi internal. Gagasan identitas ini dibedakan dari gagasan identitas yang seolah-olah lahir dalam ruang vakum yang mengikuti logika persamaan. Dilihat dari sisi ini, stigma yang lahir dari propaganda adalah “identitas” yang tidak dilahirkan dari perbedaan melainkan penyamaan. Perbedaan internal tidak dipahami sebagai bagian inheren melainkan aksiden yang perlu ditoleransi untuk kemudian disamakan.

Politik Identitas Yang Berbasiskan Etnis dan Proses Memperjuangkannya

Thung Ju Lan

Berbicara tentang politik identitas yang oleh banyak kalangan dirasakan semakin menguat sejak kejatuhan Soeharto yang dicontohkan oleh panitia melalui “syndrom ‘Putra Daerah’” dan upaya pemberlakuan Syari’ah Islam. Pada dasarnya kita baru berbicara tentang fenomena yang tampak saja, karena umumnya lebih ditekankan pada ‘simbol-simbol’ – baik etnis maupun agama yang belum bermakna atau bahkan bermakna ganda. Hal ini akan tampak jelas kalau kita mendiskusikan pengertian politik identitas itu sendiri.

Menurut panitia, definisi politik identitas berkaitan dengan adanya “proses peminggiran, pembungkaman, dan penyeragaman yang dilakukan oleh ideologi *mainstream*” dan terbukanya kesempatan kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk “mengekspresikan identitas-identitas kelompoknya, yang bahkan pada perjalanannya menjadi sebuah gerakan agar identitas –identitas ini secara politis diterima”. Pendefinisian seperti ini walaupun bisa dikatakan mendekati kenyataan yang kasat mata, namun belum membantu kita untuk memahami apa sesungguhnya politik identitas tersebut. Selain itu, pendefinisian yang demikian mengasumsikan bahwa kelompok pendukung ideologi *mainstream sendiri* dalam hal ini rejim Orde Baru- tidak melakukan politik identitas, alau pada prakteknya penghegemonian yang terjadi adalah bagian dari politik identitas itu sendiri. Ini artinya bahwa kita perlu melihat politik identitas sebagai suatu proses interaksi sosial yang selalu berlangsung dua arah, bukan satu arah. Interaksi inilah yang kemudian menghasilkan apa yang kita sebut dengan diskursus identitas tentang ‘*us*’/‘kita’ dan ‘*they*’/‘mereka’ atau ‘*other*’. Tanpa ada ‘kita’ tidak adakan ada ‘mereka’, dan sebaliknya. Dalam perkembangan selanjutnya, keduanya juga terus saling menguatkan keberadaan dirinya melalui penekanan pada perbedaan dengan pihak yang lain. Hal ini, misalnya tampak jelas dalam kasus identitas kelnggrisan yang digambarkan oleh Stuart Hall, bahwa ia (identitas kelnggrisan) menempatkan

“the others’ by the nature of the ‘English eye’ as different (what the English are not), while representing itself as ‘condensed, homogeneous and unitary’”(1991:20&22).

Sebelum kita berlanjut pada diskusi tentang politik identitas ini, saya ingin menyinggung dulu tentang persoalan etnisitas. Di sini saya ingin membedakan antara kata ‘etnis’ dan ‘etnisitas’. Kata etnis biasanya dipakai sebagai ajektif atau kata sifat dari benda tertentu yang dalam hal ini berkaitan dengan individu atau kelompok. Etnisitas sendiri adalah kata kerja benda yang berkaitan dengan suatu proses pembentukan identitas. Ketika kita berbicara tentang politik identitas, maka kita berbicara tentang etnisitas bukan etnis, yaitu politik etnisitas.

Lebih jauh lagi, kata etnisitas itu sendiri tidak bermakna sempit sebagaimana umumnya kata etnis diartikan. Seperti kita ketahui, kata etnis dikaitkan dengan pendefinisian yang dibuat para antropolog klasik tentang kelompok –kelompok etnis yang mempunyai batas-batas keetnisan yang jelas. Untuk kasus Indonesia, kata etnis ini diterjemahkan sebagai suku bangsa. Bila kita mengacu pada tulisan pak Koentjaraningrat tentang suku-suku bangsa di Indonesia, akan tampak jelas bahwa kata etnis atau suku bangsa itu didenifisikan melalui batas-batas kesamaan historis, geografis, dan kultural. Ini tidaklah salah karena di masa lalu kelompok-kelompok etnis atau suku bangsa itu emmang saling hidup terpisah satu sama lain sehingga perbedaan di antara mereka sangat jelas.

Akan tetapi, berbicara tentang politik etnisitas tentunya saja kita perlu menempatkannya dalam konteks masa kini, bukan di masa lalu, karena kemunculan konsep ini terkait dengan berkembangnya aliran post modernis dalam dunia akademis ilmu sosial, dan aliran ini juga berkembang sejalan dengan proses modernisasi globalisasi ‘*modern*’ yang terjadi di abad yang lalu dan di abad ke 21 ini. Kian mengaburnya batas-batas negara akibat berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi yang semakin canggih, yang diikuti dengan perpindahan dan pergerakan manusia yang semakin cepat, telah membawa kemunculan pemikiran yang kritis terhadap isu ‘batas’ atau ‘*border*’. Oleh

karena itu batas-batas etnis yang semula kaku atau 'fixed' menjadi dicairkan. Seperti yang dikatakan oleh Len Ang (1993), pengalaman etnisitas yang harus dirasakan sebagai:

"a provisional and partial 'identity', which must be constantly (re)invented and (re)negotiated"(hal 42.)

Dalam hal ini, saya ingin menekankan kata (re)invented dan (re)negotiated, yang maksudnya bahwa definisi etnisitas kemudian tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok etnis atau suku bangsa sebagaimana dijelaskan oleh para antropolog klasik tadi. Kata etnisitas sekarang ini cenderung diterjemahkan pembentukan 'batas' atau 'border' yang mempunyai karakteristik dasar seperti kelompok etnis, yaitu bertitik tolak pada *kinship*, atau perhubungan persaudaraan atau *brotherhood*. Namun kategorinya bisa mencakup kategori-kategori sosial dasar yang memang kita miliki seperti etnis, agama, jender, umur, kelas, organisasi profesi atau usaha, lokalitas maupun ideologi.

Apabila kita kembali pada pembicaraan kita tentang kemunculan diskursus identitas yang terkait dengan proses interaksi sosial, maka jelas sekali bahwa diskursus tentang 'borderless' ini terbentuk akibat adanya diskursus tentang 'border' karena tanpa adanya 'border' maka tidak akan ada 'borderless'. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa keduanya tidak saling meniadakan, melainkan saling menguatkan keberadaan yang lain. Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa Orde Baru muncul karena hilangnya Orde Lama. Orde Baru menjadi ada dan besar karena selalu didampingi oleh Orde Lama. Begitu juga, Orde Reformasi tidak bisa hadir dan berkembang tanpa keberadaan Orde Baru. Maka, tidak mengherankan apabila kita selalu mendengar bagaimana dulu Orde Baru selalu menyalahkan Orde Lama untuk segala sesuatu yang tidak beres. Begitu pula dengan Orde Reformasi sekarang ini, ia tidak pernah berhenti menyalahkan Orde Baru. Dalam hal ini, kita kembali apa yang dikatakan Stuart Hall di atas tentang 'the other(s)' sebagai 'berbeda', yang 'kita tidak atau bukan'.

Dari diskusi kita di atas, saya pikir tampak jelas sekali bagaimana etnisitas atau politik etnisitas itu bekerja di dalam kehidupan kita. Politik etnisitas ini tidak hanya ada setelah keruntuhan Orde Baru, melainkan sudah sejak sebelum keberadaan negara-bangsa Indonesia, terutama kalau kita mengingat kembali cerita-cerita lama tentang pertarungan antara Pajang dan Mataram, antara Mataram dan Sriwijaya, serta antara Majapahit dan Pajajaran yang juga melibatkan persoalan identitas –Ke Pajangan, ke Mataraman, ke Sriwijayaan, ke Mjapahitan, dan ke Pajajaran yang kuat di antara pengikut/pendukung masing-masing pihak. Politik identitas memang dekat dengan kekuasaan dan konflik perebutan kekuasaan tersebut. Apakah konflik tersebut akan diikuti dengan pertumpahan darah adalah suatu cerita yang lain, tapi jelas sekali bahwa selama masih ada kekuasaan yang bisa diperebutkan maka kita akan terus menghadapi konflik antar kelompok dan juga persoalan politik identitas yang terkait dengan hal tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kita melihat gejala semakin maraknya partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa yang mengusung simbol-simbol identitas atau kategori-kategori sosial dasar tadi, termasuk agama, khususnya ketika ajang puncak perebutan kekuasaan –pemilu 2004 telah kian mendekat.

Berbicara tentang pengusungan simbol-simbol identitas tersebut, pada hakekatnya kita berbicara tentang strategi politik identitas, atau yang disebutpanitia sebagai "proses memperjuangkannya". Apabila kita mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Gayatri Spivak tentang '*strategic essentialism*'¹⁵ (Ang, 1993:42) maka saya pikir kita semua akan bisa memahami mengapa kategori-

¹⁵ Gayatri Spivak's 'strategic essentialism' is "forms of diasporic identifications with a specific ethnicity (such as 'Chineseness') "which "enable diasporic subjects, not to 'returnhome' but, in the words of Stuart Hall, to 'insist that others recognise that what they have to say comes out of particular histories and cultures and that everyone speaks from positions within the global distribution of power'" (italics in the original)(Ang, 1993:42-

katagori sosial dasar tersebut baik etnis maupun agama cenderung dipilih sebagai simbol identitas yang di 'perjuangkan' atau 'dimanipulasi' oleh para elit. Apakah kita bisa menemukan katagori lain yang bisa bekerja seefektif katagori-katagori dasar tersebut? Saya pikir akan sulit sekali karena katagori lain tidak akan semelekat katagori-katagori dasar tersebut, khususnya ketika kita berusaha mengetatkan tali pengikat di antara individu-individu di dalam masyarakat perkotaan kita yang pola hubungannya semakin 'mekanik'.

Namun demikian, upaya panitia untuk mengaitkan fenomena maraknya pengusungan simbol-simbol identitas dengan pertanyaan "éhendak dibawa kemanakah Indonesia kita ini?" atau dengan pertanyaan "bagaimanakah sbenarnya kita harus menyikapi politik identitas inid alam konteks masyarakat kita yang heterogen?", pada hakekatnya menunjukkan bahwa argumen awal yang saya kemukakakan benar. Ketika kita hanya berbicara tentang fenomena simbol-simbol dan bukannya pengertian politik identitas yang sesungguhnya, maka yang terjadi adalah kegamangan tentang situasi saat ini. Padahal politik identitas adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari sejak dulu yang seharusnya membantu menemukan posisi yang 'paling tepat' bagi masing-masing dari kita, sehingga kita tahu bagaimana harus menempatkan diri dan bersikap terhadap indivisu-individu lainnya, dan bersama-sama kita tahu kemana kita akan mengarahkan masyarakat kita, atau Indonesia ini. Ketimpangan yang tampak dimana hanya sekelompok kecil individuyang aktif memainkan politik identitas dimungkinkan oleh tidak meratanya pemahaman tentang makna politik identitas tersebut, karena banyak orang yang masih menganggap politik hanya berada di panggung pemerintahan atau dalam wilayah negara. Bahkan ada yang beranggapan bahwa politik adalah hak istimewa sekelompok kecil individu saja (dalam hal ini elit).

Pengkotakan, konflik, kekerasan dan kerusakan yang terjadi bukanlah karena setiap orang memahami arti dari politik identitas, sebaliknya ketidak-pahamanlah yang membawa mereka pada pengkotakan, konflik, dan kekerasan. Tanpa pemahaman tentang politik identitas, sulit bagi yang bersangkutan untuk memahami posisi di mana dia berada dan untuk mengetahui bagaimana harus memposisikan diri terhadap individu-individu lain. Oleh karena itu yang dilakukannya hanyalah mengikuti 'posisi' dari mereka yang tahu dan sadar tentang hal itu, dan biasanya mereka yang disebut terakhir ini dikenal sebagai 'elit'. Yang terjadi adalah bahwa yang bersangkutan kemudian terseret oleh kepentingan orang lain(elit) yang seringkali bahkan bertentangan dengan kepentingannya sendiri ketika hal itu pada akhirnya disadari. Inilah yang keumudian tampak sebagai suatu "penyeragaman" yang 'cenderung memperkecil ruang gerak bagi keberagaman". Di sini kita juga kembali pada apa yang dikatakan oleh Stuart Hall di atas, bahwa identitas itu dalam hal identitas politik yang dikembangkan oleh para elit –cenderung merepresentasikan dirinya sebagai '*condensed, homogeneous and unitary*', dan ini juga sesuai dengan konsep yang diperkenalkan oleh Gayatri Spivak tentang '*strategic essentialism*'. Dan ini bukanlah politik identitas dalam arti yang dimaksud oleh mereka –termasuk Stuart Hall dan Gayatri Spivak yang berbicara tentang identitas (individu) yang '*fluid*' atau '*borderless*', khususnya sebagai kritik terhadap pemikiran maisntream tentang identitas yang esensialis tersebut.

Dalam pengertian para post-modernis itu, politik identitas pada hakekatnya adalah keberagaman, terutama ketika kita menerapkannya pada tingkat individu, maka tidak akan ada dua individu pun yang mempunyai posisi yang sama. Kalau kita amati dengan seksama maka jelas bahwa setiap individu mempunyai identitas ganda yang bisa bersinggungan dengan identitas individu lain, tapi juga pada waktu yang sama bersifat unik bagi dirinya. Kesamaan dan perbedaan yang selalu ada di dalam diri kita inilah yang seharusnya mengisi gerak dan tingkah laku kita dalam berinteraksi dengan

sesama manusia agar terciptanya hubungan yang setara dan saling melengkapi. Inilah makna dari pluralisme yang sesungguhnya.

Referensi

1. Ang, Ien(1993) "Migrations of Chineseness: Ethnicity in the Postmodern World" dalam David Bennet (ed) Cultural Studies: Pluralism and Theory, Melbourne University Literary and Cultural Studies, Volume 2, Parkville, Melbourne, Victoria, Australia: Department of English, University of Melbourne, hal 32-44.
2. Hall, Stuart(1991) "The Local and the Global: Globalization and Ethnicity" dalam Anthony D. King(ed). Culture, Globalization and the World-system: Contemporaru Conditions for the Representation of Identity, Hampshire & London: MacMillan bekerja sama dengan Department of Art and Art History, State University of New York di Binghamton, hal 19-39.
3. Thung Ju Lan (1998) "Identities in Flux: Young Chinese in Jakarta", Ph.D Thesis, La Trobe University, Melbourne, Australia.

Biografi Penulis

Manneke Budiman. Lahir di Bangil, 17 Novemner 1965. Mengajar bidang studi Cultural Studies di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia. Selain itu juga mengajar di Pusat Kajian Wanita di universitas yang sama. Aktivitas lainnya adalah sebagai narasumber seminar nasional maupun internasional mengenai multikulturalisme. bidang kajian yang ditekuninya adalah tentang Perempuan, Media, Globalisasi, dan Sastra Perjalanan.

St. Sunardi. Lahir di Ambarawa, 10 September 1960. Menyelesaikan S1 di STF Driyarkara, S2 di Roma dan Cairo yaitu Studi Islam, Arab, dan S3 di Roma dengan mengambil Studi Sastra Arab Kontemporer. Saat ini sebagai Ketua Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penulis beberapa buku: Paradoks-Paradoks Hubungan Antar Agama, Semiotika Negativa, Nietzsche, Opera Tanpa Kata dan yang masih dalam proses penerbitan Politik Persahabatan: Lima Essai tentang Demokrasi dan Hubungan Anytar-Agama. Bidang yang juga ditekuni adalah Pendidikan Kritis, Seni, dan Sastra, Pop Culture, Post Kolonialisme dan Post Modernisme.

Thung Ju Lan. Lahir di Jakarta, 12 Mei 1958. Peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI. Menyelesaikan S1 di Sinologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, S2 di Sosiologi di Purdue University, USA dan S3 di Sosiologi di La Trobe University, Australia. Tulisan hasil penelitian yang telah dipublikasikan adalah mengenai persoalan etnis Cina terutama mengenai konstruksi sosial “kecinaan” dan sebagai pelaku ekonomi, persoalan diskriminasi dan pluralitas. Selain itu, juga melakukan penelitian mengenai “Rekonstruksi Etnisitas di Kalimantan Timur Pasca Orde Baru”.

Profil KAPAL Perempuan

Lingkar Pendidikan Alternatif untuk Perempuan atau KAPAL Perempuan didirikan pada tanggal 8 Maret 2000 sebagai tanggapan terhadap perubahan-perubahan politik dan ekonomi yang terjadi pada masa reformasi. KAPAL Perempuan menjadi wadah bagi para aktivisnya untuk terlibat aktif dalam usaha mengembangkan cara berpikir kritis di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan perempuan yang merupakan mayoritas tetapi masih tertinggal dalam segala aspek kehidupan. Cara berpikir kritis menjadi sebuah keniscayaan dalam kerja-kerja menuju sebuah masyarakat yang adil, demokratis, dan plural.

Visi

Ikut terlibat dalam menciptakan sebuah masyarakat yang memiliki cara berpikir dalam rangka menuju sebuah masyarakat yang berkeadilan sosial, berkeadilan gender, dan demokratis.

Misi

1. Mengembangkan cara-cara berpikir kritis di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan perempuan, melalui penyelenggaraan pendidikan kritis feminis.
2. Merangsang tumbuh dan berkembangnya wacana-wacana kritis melalui penyelenggaraan diskusi rutin tentang pluralisme dan publikasi bacaan-bacaan kritis.
3. Mengembangkan akses informasi bagi perempuan dengan mendirikan sebuah pusat informasi dan dokumentasi
4. Mengembangkan dan memperkuat gerakan-gerakan perempuan yang terbuka dan plural untuk mentransformasi masyarakat menjadi masyarakat yang berkeadilan gender dan sosial.

Program-program KAPAL Perempuan

1. Program Pengembangan Pendidikan Kritis Feminis

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan program ini adalah training-training bertahap yang meliputi:

- a. Tahap I: Training menumbuhkan Sensitifitas Keadilan Gender
- b. Tahap II: Training Analisa Sosial Berperspektif Feminisme
- c. Tahap III: Training Pengorganisasian dan Advokasi Berperspektif Feminisme
- d. TOT: Pendidikan Kritis, Otonomi, dan Pluralisme
- e. Pendidikan untuk Perempuan Komunitas tahap I dan II
- f. Sekolah Perempuan di 2 Komunitas di Jakarta

2. Program Pengembangan Wacana Pluralisme

Kegiatan yang dilakukan:

- a. Penyelenggaraan Diskusi Pluralisme setiap bulan dan publikasi hasil-hasilnya
- b. Training Gender dan Agama-Agama
- c. Merumuskan materi-materi pluralisme untuk training

3. Program Pengembangan Informasi dan Inisiatif-Inisiatif Baru

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

- a. Penelitian-penelitian, yang sudah dilakukan penelitian *Perempuan dan Hubungan Antargolongan(di Jakarta, Lampung, Kalimantan Barat)* dan *Pendidikan Alternatif*.
- b. Publikasi tulisan-tulisan kritis terutama berdasarkan pengalaman-pengalaman perempuan seperti *Pengalaman Perempuan: Pergulatan Lintas Agama(2000)*, *Tafsir Baru terhadap Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Pluralisme dan Perempuan(dalam proses)*.